

**DINAMIKA KEBUDAYAAN ETNIS TIONGHOA DI KOTA
SIDOARJO TAHUN 1965-2000**

Ahmad Syahrul arifianto

Program Studi Pendidikan Sejarah, STKIP PGRI Sidoarjo
Ahmadsyahrularifianto@gmail.com

Yudi Prasetyo, Izzatul Fajriyah

Dosen Program Studi Pendidikan Sejarah STKIP PGRI Sidoarjo
Prastyudi19@gmail.com
Izzafajriyah28@gmail.com

Abstrak

Penelitian Skripsi ini mengkaji tentang dinamika kehidupan kebudayaan etnis Tionghoa di Kota Sidoarjo pada tahun 1965-2000. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dinamika kebudayaan dari Komunitas Tionghoa atau Pecinan yang ada di Kota Sidoarjo pada tahun 1965-2000. Penelitian Skripsi ini menggunakan pendekatan ilmu sejarah dengan fokus kajian sejarah etnis, wawancara, dan kajian literatur. Berdasarkan hasil wawancara yang berhasil didapatkan dan dijelaskan bahwa kebudayaan dari komunitas Tionghoa yang ada di Kota Sidoarjo tidak berdampak pada peraturan diskriminasi di masa Orba pada tahun 1965. Walaupun di seluruh komunitas Tionghoa yang ada di Indonesia pada masa Orba tepatnya pada tahun 1965 sangat berdampak dari peraturan Diskriminasi yang diterapkan oleh pemerintahan Orba. Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid yang pada tahun 2000 Etnis Tionghoa mendapatkan pengakuan dari Gus Dur untuk menjalankan segala aktifitas kebudayaannya. Sehingga pada tahun 2000 juga Gus Dur mendapatkan sebutan sebagai “Bapak Tionghoa Indonesia” dari seluruh kalangan etnis Tionghoa.

Kata Kunci: *Kebudayaan, Etnis Tionghoa, tahun 1965-2000, Kota Sidoarjo*

Abstract

Research This Thesis examines the dynamics of Chinese ethnic Cultural life in Sidoarjo City in 1965-2000. The purpose of this research is to find out how the Cultural dynamic of the Chinese or Chinatown community in Sidoarjo City in 1965-2000. Research This Thesis uses a historical science approach with a focus in ethnic history studies, interviews, and literature review. based on the result of interviews that were successfully

(nama belakang), (judul (dua kata saja)) ...

obtained and explained that the culture of the hopeless Chinese community in the city of Sidoarjo had no impact on the discrimination regulations in the new order era in 1965-2000. Although throughout the Chinese community in Indonesia during the new order era in 1965 to be precise, the discrimination regulations that had been implemented by the new order were very impactful. During the reign of President Abdurahman Wahid, in 2000 the ethnic Chinese received recognition from Gus Dur for carrying out all his cultural activities so that in 2000 Gus Dur also earned the nickname “Father Chinese Indonesia” from all ethnic Chinese.

Keywords: *Culture, Chinese Ethnicity, 1965-2000, City of Sidoarjo*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara multikultural dimana terdapat keberagaman budaya¹ ini dipengaruhi oleh kondisi alam Indonesia yang luas. Selain itu keberagaman budaya di Indonesia juga dipengaruhi oleh sejarah panjang sejarah Indonesia dari masa kerajaan, Kolonial hingga kini. Selain suku asli Indonesia, berbagai bangsa pendatang juga menetap dan akhirnya berkembang membuah sebuah golongan baru dalam struktur lapisan masyarakat, seperti peranakan Eropa, Melayu, India,

Arab, hingga Tionghoa. Etnis-etnis ini tumbuh dan berkembang serta berasimilasi dengan masyarakat pribumi. Perkembangan kehidupan etnis-etnis di Indonesia telah menjadi satu dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Pergantian rezim pemerintah dari Orde Lama, Orde Baru hingga masa reformasi telah mempengaruhi dinamika kehidupan kebudayaan etnis-etnis pendatang ini.

Masyarakat Tionghoa tergolong dalam masyarakat minoritas Indonesia, sebenarnya etnis Tionghoa sudah ada pada abad ke-5. Warga Tionghoa melebur

¹ Penyesuaian diri terhadap kebudayaan dan pola-pola perilaku. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Available at: <https://kbbi.web.id/asimilasi>

menjadi warga setempat yang memiliki sejarah panjang di Indonesia, walaupun tidak selalu baik. Karena hal tersebut merupakan suatu fakta sejarah yang tak terbantah, bahwa etnis Tionghoa adalah pendatang, terlepas dari kenyataan bahwa kedatangannya terjadi berabad-abad lampau yang diperkirakan sekitar abad ke-5, sehingga keberadaannya bukan lagi hal baru. Fakta sejarah ini tak bisa dihapus dan harus diterima oleh bangsa Indonesia sebagai bagian integral kehidupan orang Tionghoa Indonesia. Etnis Tionghoa harus bisa diterima secara legowo untuk membangun kembali Indonesia, karena mereka sudah merupakan bagian integral bangsa Indonesia.²

Pada dasarnya praktik diskriminasi telah terjadi pada era kemerdekaan Indonesia. Dimana dalam usaha diskriminasi terhadap Etnis Tionghoa

dilakukan oleh negara Indonesia. Misalnya pada era pemeritahan presiden yang pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno. Pada awalnya soekarno menyerukan kepada suatu Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia, agar warga Etnis Tionghoa melakukan suatu integrasi, yaitu mempertahankan identitas Tionghoa sambil tetap menjadi warga Negara Republik Indonesia, namun kepada Lemabaga Pembina Kesatuan Bangsa (LPKB) Presiden Soekarno mengatakan agar Etnis Tionghoa melakukan asimilasi, yang dimana Etnis Tionghoa harus membaaur secara total terhadap kebudayaan Indonesia³

² *Ibid.*, hlm. 223.

³ Penulis berpendapat bahwa diskriminasi terhadap etnis Tionghoa sudah terjadi sejak masa pemerintahan Orde lama, dimana presiden Ir. Soekarno menyerukan agar etnis Tionghoa melakukan asimilasi melalui Lembaga Pembina Kesatuan Bangsa (LPKB). Leo Suryadinata, *Dilema minoritas Tionghoa* (Jakarta : PT. Grafiti Pers, 1984), hlm. 26.

(nama belakang), (judul (dua kata saja)) ...

Metode dalam ilmu sejarah adalah seperangkat aturan dan prinsip sistematis dalam mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara sistematis, menilainya secara kritis, dan mengajukan sintesis secara tertulis atau suatu prosedur dalam menyusun detail-detail yang telah disimpulkan dari dokumen-dokumen autentik menjadi suatu kisah yang saling berhubungan.⁴

Heuristik Sebelum menentukan teknik pengumpulan sumber sejarah, pertama-tama yang perlu dipahami adalah bentuk dari sumber sejarah yang akan dikumpulkan. Penentuan sumber sejarah akan memengaruhi tempat (dimana) atau siapa (sumber informasi lisan) dan cara memperolehnya. Seperti yang dijelaskan, sumber sejarah dibedakan atas sumber tulisan, lisan, dan benda. Ketika sumber ini dapat digunakan sekaligus bila

⁴ Abd Rahman Hamid dan Muhammad Saleh Madjid, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta, Penerbit Ombak, 2009), hlm. 42.

memungkinkan. Mengingat sifatnya sistematis, maka tahap-tahap dari metode sejarah tidak dapat ditukar balik atau mendahulukan kritik, interpretasi, ataupun historiografi. Semua jenis tulisan atau penelitian tentang sejarah menempatkan sumber sejarah sebagai syarat mutlak yang harus ada. Tanpa sumber sejarah, kisah masa lalu tidak dapat direkonstruksi oleh sejarawan.⁵

Verifikasi setelah sumbernya dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah kritik sumber untuk menentukan keautentikan dan kredibilitas sumber sejarah. Semua sumber yang telah dikumpulkan terlebih dahulu verifikasi sebelum digunakan. Dalam penulisan. Dua aspek yang dikritik ialah keautentikan (keaslian sumber) dan kredibilitas (tingkat kebenaran informasi) sumber sejarah.⁶ Penentuan keaslian sumber berkaitan dengan bahan yang digunakan dari

⁵ *Ibid.*, hlm. 43.

⁶ *Ibid.*, hlm. 47.

sumber tersebut, atau biasa disebut kritik eksternal. Sedangkan, penyeleksian informasi yang terkandung dalam sumber sejarah, dapat dipercaya atau tidak, dikenal dengan kritik internal. Setiap sumber sejarah diperlakukan sama, yakni diseleksi baik segi eksternal maupun internalnya. Tahap penyeleksian harus sistematis, yakni diawali dengan kritik eksternal dan kemudian kritik internal. Jika tahap pertama suatu sumber sejarah tidak memenuhi syarat sebuah sumber sejarah (dari segi keautentikan), tidak perlu dilanjutkan verifikasi tahap selanjutnya.

Interpretasi atau penafsiran sejarah sering kali disebut juga dengan analisis sejarah. Analisis sendiri berarti menguraikan, dan secara terminologi berbeda dengan sintesis yang berarti menyatukan. Namun keduanya, analisis dan sintesis, dipandang sebagai metode-

metode utama didalam interpretasi.⁷ dalam proses interpretasi sejarah, seseorang peneliti harus berusaha mencapai pengertian faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peristiwa. Fakta sejarah memang menghasilkan beberapa sebab yang membantu mencapai hasil dalam berbagai bentuknya. Walaupun suatu sebab seringkali dapat mengantarkan kepada hasil tertentu, tetapi mungkin juga sebab yang sama dapat mengantarkan kepada hasil yang berlawanan dalam lingkungan lain. Interpretasi dapat dilakukan dengan cara membandingkan data untuk membuktikan peristiwa-peristiwa mana yang terjadi dalam waktu yang sama. Jadi jelaslah, untuk mengetahui sebab-sebab dalam peristiwa sejarah itu memerlukan pengetahuan tentang masa lalu sehingga pada saat penelitian peneliti

⁷ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Yayasan Bentang, 1995), hlm. 100.

(nama belakang), (judul (dua kata saja)) ...

akan mengetahui situasi pelaku, tindakan, dan tempat peristiwa itu. Analisis sejarah dengan pendekatan situasional.⁸

Historiografi merupakan tahap akhir dari penulisan sejarah, setelah melalui heuristik, kritik sumber, dan interpretasi. Pada tahap akhir inilah penulisan sejarah dilakukan.⁹ Pengisahan sejarah itu jelas sebagai suatu kenyataan subjektif, karena setiap orang atau setiap generasi dapat mengarahkan sudut pandangnya terhadap apa yang telah terjadi dengan berbagai interpretasi yang erat dengan kaitannya dengan sikap hidup, pendekatan, atau orientasinya. Oleh karena itu, perbedaan pandangan terhadap peristiwa masa lampau, yang pada dasarnya ialah objektif dan absolut, pada gilirannya akan menjadi

kenyataan yang relative.¹⁰ Bagi penulis sejarah ataupun sejarawan akademis yang menganut *relativisme historis*, yakni pandangan sejarah yang serba relatif, mengedepankan sikap netral dalam pengkajian dan penulisan sejarah merupakan hal yang sulit direalisasikan. Ketika berada di meja kerja, sejarawan pemula yang belum memiliki pengalaman menulis kisah sejarah akan mengalami kebingungan. Memikirkan dari mana mulai menulis suatu kisah masa lalu menjadi masalah yang sangat mengganggu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kehidupan Kebudayaan Etnis

Tionghoa di Kota Sidoarjo Pada Masa Orde Baru

Orang-orang etnis Tionghoa yang ada di Indonesia pernah dianggap sebagai suatu orang asing di negerinya yaitu negara Tiongkok. Dua tahun setelah terjadinya peristiwa kudeta Presiden

⁸ Dudung Abdurahman, *Metodologi Penelitian Sejarah Islam* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2011), hlm. 114-115.

⁹ M. Dien madjid dan Johan Wahyudi, *Ilmu Sejarah sebuah pengantar* (Jakarta: Penerbit Kencana, 2014), hlm. 230.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 231.

pertama yaitu Presiden Soekarno oleh Soeharto, mulai terjadi suatu sentiment anti-Tionghoa yang dimana sudah tersebar diseluruh kalangan masyarakat Indonesia. Penyebaran sikap diskriminasi anti-Tionghoa yang sudah semakin menguat dan parah, pada akhirnya membuat pemerintahan Presiden Soeharto harus dengan segera membuat sebuah perumusan suatu kebijakan dasar dimana untuk meredam sentiment anti-Tionghoa tersebut. Suatu langkah pertama yang diambil oleh pemerintahan adalah dengan mengeluarkan sejumlah kebijakan-kebijakan untuk mempercepat sebuah asimilasi orang Tionghoa dengan masyarakat Indonesia.¹¹

Pada masa pemerintaha Orde Baru juga terdapat pengaruh keamanan dan departemen agama yang ikut campur dalam sebuah pelaksanaan ibadah

keagamaan, terutama pada bentuk yang berbau keTionghoan. Pada masa dahulu acara seperti Tahun Baru Imlek, Perayaan Rebutan, atau Festival Kapal Naga adalah sebuah acara umum yang sangat menarik bagi penonton dan bahkan para pesertanya berasal dari beberapa kalangan dan komunitas dengan disertai berbagai jenis arak-arakan, menebar hadiah, dan membuka arak-arakan yang sangat besar. Selanjutnya pada kegiatan agama Cina hanya dilaksanakan di sekitar lingkungan kelenteng atau didalam kediaman keluarga etnis Tionghoa. Selain dari beberapa alasan ketertiban umum, pemerintahan juga berdalih bahwa sebuah perayaan seperti Tahun Baru Imlek bukanlah dari perayaan agama Budha dan oleh karena itu tidak dengan alasan yang sangat kuat.¹²

¹¹ Aimee Dawis, *Orang Indonesia Tionghoa Mencari Identitas*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 104.

¹² Justian Suhandinata, *WNI Keturunan Tionghoa dalam Stabilitas Ekonomi dan dan Politik Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 135.

(nama belakang), (judul (dua kata saja)) ...

Dikeluarkannya peraturan Intruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 telah membuat ruang gerak kebudayaan etnis Tionghoa sangat terbatas. Dampak lain dari Peraturan Intruksi Presiden ini adalah tidak diakui agama Konghucu oleh Pemerintahan Orde Baru. Tidak diakuinya agama Konghucu di Negara Indonesia oleh Pemerintahan Orde Baru membuat kalangan orang-orang Tionghoa di Kota Sidoarjo harus memilih salah satu dari lima agama yang ada di Indonesia untuk dimasukkan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP). Lima agama yang dimaksud adalah Islam, Budha, Hindu, Kristen Protestan, dan Kristen Katolik. Dengan demikian masyarakat orang etnis Tionghoa pada masa pemerintahan Orde Baru melakukan Konversi agama. Korvensi agama sendiri adalah transformasi spiritual pada diri individu manusia yang ditandai dengan suatu

pergantian dari sebuah agama awal ke agama yang baru. Korvensi agama bukan halnya berkaitan dengan suatu adopsi pengetahuan dalam agama yang sangat baru, namun harus disertai dengan usaha untuk menjadikannya suatu pandangan hidup yang sangat baru.¹³

Ditutupnya semua sekolah-sekolah etnis Tionghoa di Kota Sidoarjo merupakan salah satu upaya pembauran yang dilakukan oleh Pemerintahan Orde Baru dalam mempercepat asimilasi terhadap etnis Tionghoa. Anak-anak dari orang-orang Tionghoa yang diberi izin mengenyam pendidikan sekolah yang sudah disediakan oleh pemerintahan atau sekolah swasta yang dimana menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar ketika pembelajaran. Asimilasi ini diharapkan dapat bisa

¹³ Rabith Jihan Amaruli Puji Utama, "Konversi Agama dan Formasi Identitas: Tionghoa Muslim Kudus Pasca Indonesia Orde Baru" *Jurnal Humanika* Vol. 22 No. 2, Tahun 2015.

tercapai dengan sering bertemunya anak-anak keturunan dari orang-orang Tionghoa dengan anak-anak keturunan masyarakat Indonesia asli. Di satu sisi, dengan adanya ditutupnya sekolah-sekolah dari kalangan orang Tionghoa pengajaran bahasa Mandarin yang dari dulu sudah diajarkan, akhirnya tidak lagi didapatkan oleh anak-anak keturunan Tionghoa dibangku sekolah.

Peraturan Pemerintah Orde Baru Terhadap Kebudayaan Etnis Tionghoa di Sidoarjo

Menurut peraturan yang dikeluarkan ini agama dan kebudayaan yang kebanyakan sudah dianut oleh kalangan orang Tionghoa di wilayah Pecinan, Kota Sidoarjo, yakni agama Budha dan Konghucu hanya dapat dijalankan hanya dalam ruang lingkup keluarga saja, yang artinya dimana dimana dalam perayaan-perayaan hari besar seperti Tahun Baru Imlek, Perayaan Kue Bulan, dan Cap Go

Meh harus dirayakan dalam ruang lingkup keluarga atau jika dirayakan secara umum tidak boleh mencolok.¹⁴ Menilik pada jenis fungsinya, tidaklah salah bila Kelenteng Tjong Hok Kiong menjadi salah satu pusat dalam kegiatan masyarakat Tionghoa di Kota Sidoarjo. Akan tetapi, pemerintah Orde Baru membawa perubahan yang sangat besar terhadap Kelenteng-Kelenteng di Indonesia melalui Peraturan Menteri Perumahan No. 445.2-360/1988, yang isinya tentang pelarangan penggunaan lahan untuk mendirikan, memperluas, atau memperbaiki Kelenteng.¹⁵

Kebijakan dalam asimilasi yang telah dikeluarkan dalam bidang pendidikan adalah penutupan sekolah-sekolah Tionghoa di wilayah Pecina, Kota Sidoarjo yang dilakukan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang sudah sejalan dengan peraturan Intruksi Presiden agar peranakan asing (Tionghoa)

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 108.

¹⁵ Majalah Tempo, *Etnis Tionghoa di Zaman yang Berubah*, (Jakarta: Edisi 16-22 Agustus 2004), hlm. 37.

(nama belakang), (judul (dua kata saja)) ...

bersekolah di sekolah Nasional atau Swasta yang telah mengikuti kurikulum nasional yang sudah diatur dalam Pasal 8 dari Intruksi Presidium Kabinet Nomor 37/U/IN/1967 tentang kebijaksanaan pokok dalam penyelesaian masalah etnis Tionghoa.¹⁶ Keputusan Pemerintahan P & K Nomor 0170/U/1975 tanggal Bulan Agustus 1975 tentang pedoman pelaksanaan asimilasi dalam Bidang Pendidikan

Kondisi Etnis Tionghoa di Kota Sidoarjo Pada Era Pasca Reformasi

Pada tahun 1999, pendidikan Bahasa Mandarin di wilayah Pecinan Sidoarjo, mengalami kemajuan yang sangat pesat. Beberapa tempat di berbagai jenis lembaga pendidikan yang ada di Kota Sidoarjo, terutama untuk sekolah khusus orang etnis Tionghoa mulai mengajukan izin untuk menyelenggarakan dalam mata pelajaran Bahasa Mandarin. Suatu perkembangan trend dalam Bahasa mandarin di masyarakat belum bisa dikatakan bahwa pendidikan orang-orang

kalangan etnis Tionghoa belum bisa untuk kembali lagi. Pendidikan Bahasa Mandarin setelah masa Orde Baru lebih tepatnya dimasa Reformasi sudah bisa dilaksanakan di tempat-tempat kursus untuk Bahasa Mandarin.¹⁷ Kemajuan dalam ber-Bahasa Mandarin setelah masa pemerintahan Orde Baru dikalangan Komunitas Tionghoa di sekitar Kelenteng Tjong Hok Kiong Sidoarjo bukan karena suatu dorongan untuk mengembalikan hasil kebudayaan, namun karena dari sebuah faktor dorongan permintaan pasar yang sangat tinggi. Dalam dunia kerja mulai mencari seorang pegawai yang harus memiliki kecakapan dalam berbahasa Mandarin. Hal tersebut telah mengikuti kemunculan Negara Tiongkok sebagai Negara yang dengan perindustrian maju.

Pada masa Reformasi tahun 1999 sudah mulai ada keterbukaan antara

¹⁶ AimeI Dawis, *Op.Cit*, hlm. 109.

¹⁷ Chang Yau Hoon, *Op. Cit*, hlm. 77-79.

pemerintahan terhadap keberadaan Kelenteng dan komunitas orang Tionghoa. Kemudian pada tahun 2000 dikeluarkan kepres No. 6 Tahun 2000 yang isinya menjelaskan tentang pencabutan Inpres No. 14 Tahun 1967 dan sudah diakuinya agama Kong Hu Cu sebagai agama yang resmi di Indonesia. Era Reformasi sangat memberikan pengaruh dalam sektor kebudayaan pada kelompok komunitas etnis Tionghoa yang ada di Kota Sidoarjo.¹⁸ Kesenian Barongsai semenjak pemerintahan awal Gus Dur sampai sekarang sudah mengalami banyak perkembangan. Pada saat ini kesenian Barongsai juga bisa diambil pelajaran untuk kalangan masyarakat Sidoarjo, dan tidak hanya

orang-orang dari komunitas Tionghoa di Kota Sidoarjo.¹⁹

Dengan adanya perlindungan dari payung hukum untuk perayaan Hari Raya Imlek, berarti pula terbuka karena hasil keterbukaan bagi para WNI terutama keturunan Tionghoa di Kota Sidoarjo. Sehingga orang Tionghoa di Kota Sidoarjo tidak perlu ragu lagi untuk mengabdikan kepada bangsa dan negara Indonesia yang telah membesarkan mereka, Indonesia. Hal ini juga berarti WNI keturunan Tionghoa memiliki kesetaraan dengan WNI lainnya pada umumnya. Dengan demikian bisa diharapkan, bagi warga WNI keturunan Tionghoa sekin mencintai hingga sepenuh hati kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan tidak segan-

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Aprilianto Trenggono (62 Tahun), Sekretaris Kelenteng Tjong Hok Kiong Sidoarjo, 27 Oktober 2022.

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Aprilianto Trenggono (62 Tahun), Sekretaris Kelenteng Tjong Hok Kiong Sidoarjo, 27 Oktober 2022.

(nama belakang), (judul (dua kata saja)) ...

segaran memberikan jasa dan karyanya untuk negeri yang tercinta²⁰.

SIMPULAN

Indonesia adalah negara yang multikulturalisme, dimana terdapat suatu keberagaman didalam kebudayaannya, hal ini dikarenakan oleh karena di dalam negara ini memiliki tingkat nilai pluralisme yang sangat tinggi. Sikap pluralitas ini sudah lama tercemin dari masa Kolonial hingga kini. Selain terdapat suku asli yang berada menetap di kepulauan Indonesia, juga ada suku-suku dan etnis pendatang lain yang menetap di kepulauan Indonesia. Seperti suku Batak, Dayak, Jawa, Bugis, etnis Arab, etnis Tionghoa, etnis India. Perkembangan etnis di seluruh negara Indonesia telah menjadi satu dalam perjalanan sejarah Indonesia. Sedangkan dalam masa pergantian rezim Orde lama ke Orde Baru

lalu ke Reformasi sangat mempengaruhi dinamika kehidupan kebudayaan etnis-etnis pendatang, misalnya seperti etnis Tionghoa.

Maka dari itu, orang-orang dari komunitas Tionghoa dianggap sangat sukses daripada orang-orang Indonesia, pada akhirnya dapat menyebabkan sikap anti-Tionghoa yang berawal dari tragedi kemanusiaan yang terjadi pada bulan Mei tahun 1998 dimana seluruh kalangan orang dari etnis Tionghoa mengalami trauma yang mendalam. Tidak itu saja, orang-orang Tionghoa juga mendapatkan pengalaman yang sangat pahit pada masa pemerintahan Orde baru melalui beberapa kebijakan pemerintah pada masa itu dengan cara Diskriminasi.

Eksistensi kebudayaan dari kalangan etnis Tionghoa di Kota Sidoarjo terutama disekitar Komunita Tionghoa yang ada di Jl. Gajah mada dan di Kelenteng Tjong Hok Kiong masih terjaga dengan baik.

²⁰ Wawancara dengan Bapak Danny (47 Tahun), Pengurus Harian Kelenteng Tjong Hok Kiong Sidoarjo, 27 Oktober 2022.

Walaupun pada masa pemerintahan Orde Baru terdapat pembatasan terhadap etnis Tionghoa dalam menjalankan kebudayaannya, sedangkan di Kelenteng Tjong Hok Kiong adalah salah satu tempat yang berperan sangat besar sebagai tempat untuk mempertahankan kebudayaan dari etnis Tionghoa. Komunikasi yang dibangun sangat baik antara pengurus Kelenteng Tjong Hok Kiong, masyarakat setempat dan pihak aparat keamanan dengan memberikan rasa aman terhadap orang etnis Tionghoa yang hendak menjalankan ibadah. Dan upaya pemerintahan dalam menetapkan Kelenteng Tjong Hok Kiong sebagai salah satu cagar budaya merupakan salah satu bentuk pengakuan terhadap hasil eksistensi kebudayaan Tionghoa.

DAFTAR PUSTAKA (APA Style)

A, Afif. *Identitas Tionghoa Muslim Indonesia: Pergulatan Mencari Jati Diri*, (Depok: Penerbit Kepik, 2012).

Abdurahman Wahid, *Beri Jalan Orang Cina*, dalam *Nonpri Di Mata Pribumi*, ed J. Jahja, (Jakarta: Yayasan Tunas Bangsa, 1991).

Abdurahman Wahid. *Prisma Pemikiran Gus Dur*, (Yogyakarta: LKis, 2010).

Abdurrahman Wahid, *Islam Kompolitan: Nilai-Nilai Indonesia & Transformasi Kebudayaan*, (Jakarta: Wahid Institute, 2007).

Allen, Pamela. *Literature and Media: Contemporary Literature From the Chinese 'Diaspora' in Indonesia*, dalam *Jurnal Asia Ethnic* Vol. 4 No.3 Tahun 2003.

Awaluddin Yusuf, Iwan. *Media, Kematian, dan Identitas Budaya Minoritas: Representasi Etnik Tionghoa dalam Iklan Dukacita*, (Yogyakarta: UII Press, 2005).

Basundoro, Purnawan. *"Penduduk dan Hubungan Antar Etnis di Kota*

(nama belakang), (judul (dua kata saja)) ...

- Surabaya." *Jurnal Paramita*, Vol. 22 No. 1, 2012.
- Benny G, Setiono. *Tionghoa Dalam Pusara Politik*, (Jakarta: Elkasa, 2005).
- Prasetyo, Yudi. "Dari Pikulan Ke Kelontong: Tionghoa dan Toko Kelontong Yogyakarta 1900-1942" dalam *Jurnal Entita* Vol. 2 No. 1, Juni 2020.
- Prasetyo, Yudi. *Meneer Baba Perkembangan Modernisasi Dalam Gaya Hidup Elite Tionghoa Batavia Pada Masa Akhir Kolonial*, Tesis S-2 Program Studi Sejarah Pascasarjana Universitas Gajah Mada(Yogyakarta: 2011).
- Suryadinata, leo. *Politik Peranakan Tionghoa di Jawa*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2019).
- Suryadiningrat, Leo. *Dilema Minoritas Tionghoa*.(Jakarta : PT. Grafiti Pres, 1984).
- Suryadiningrat, Leo. *Negara dan Etnis Tionghoa*, (Jakarta : Pustaka LP3ES, 2002).
- Wawancara dengan Bapak Aprilianto Trenggono (62 Tahun), Sekretaris Kelenteng Tjong Hok Kiong Sidoarjo, 27 Oktober 2022.
- Wawancara dengan Bapak Danny (47 Tahun), Pengurus harian Kelenteng Tjong Hok kiong Sidoarjo, 27 Oktober 2022.
- Wawancara dengan Bapak Aprilianto Trenggono (62 Tahun), Sekretaris Kelenteng Tjong Hok Kiong Sidoarjo, 27 Oktober 2022.
- Wawancara dengan Bapak Danny (47 Tahun), Pengurus harian Kelenteng Tjong Hok kiong Sidoarjo, 27 Oktober 2022.

